

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu; untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama pembangunan sebuah negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.¹ Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.² Penanggulangan kemiskinan ditujukan :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. Untuk memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
- c. Untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh

¹Listyaningsi, *Administrasi Pembangunan Pendekatan dan Konsep Implementasi*,(Yogyakarta :Graha Ilmu,2014), h.36

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 19

kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

- d. Untuk memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.³

Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar yang mana tujuan Penanganan fakir miskin adalah untuk :⁴

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
- b. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
- d. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Untuk itu maka ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu pemerintahan adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar. Didalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di kabupaten kampar dijelaskan bahwa setiap penduduk miskin mempunyai hak:⁵

1. hak atas kebutuhan pangan
2. hak atas pelayanan kesehatan
3. hak atas pelayanan pendidikan
4. hak atas pekerjaan dan berusaha
5. hak atas perumahan
6. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik
7. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
8. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan, dan
9. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

³*Ibid*, pasal 20

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 *Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar*, pasal 2

⁵*Ibid*, pasal 11

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru (ORBA) dipraktekkan secara Sentralistis berubah menjadi Desentralistis. Desentralistis adalah pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pusat kepada daerah namun tanggung jawab pelimpahan tetap berada dipusat.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Karena itu, maka yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, baik di pusat maupun di daerah khususnya daerah pedesaan. Sebab masih banyak desa miskin yang terdapat di seluruh pelosok tanah air.

Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya yaitu :

1. Bidang politik

Di bidang politik dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik.

⁶Kamaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Demokrasi ,Hak Azazi Manusia dan Masyarakat Madani* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 198

2. Bidang ekonomi

Dibidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dipihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

3. Bidang sosial budaya

Di bidang sosial dan budaya memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespons positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan sosial.⁷

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah. Pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan didaerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat penuhi antara lain :⁸

1. Fasilitas.
2. Pemerintahan daerah harus kreatif.
3. Politik lokal yang stabil.
4. Pemerintahan daerah harus menjamin kesinambungan berusaha.
5. Pemerintahan daerah harus komunikatif, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.

⁷ *Ibid*, h.154

⁸ *Ibid*, h.155

Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁹ Sedangkan menurut HAW. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹⁰

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman

Artinya keanekaragaman disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2. Partisipasi

Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi Asli,

Artinya bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.

⁹Sitiawan Widagdo, *Kamus Hukum*,(Jakarta :PT. Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 131

¹⁰HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2005), h. 3

4. Demokrasi,

Artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat,

Artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pembatasan garis kemiskinan masih terbatas pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan yang lainnya.¹¹ Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan yang diperlukan adalah pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan dalam melaksanakan sebagai urusan rumah tangga desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

¹¹ Husni Thamrin dan Koko Iskandar, *Kemiskinan Di Riau Realitas Dan Kebijakan*, (Lembaga Penelitian Dan Pengembangan UIN SUSKA RIAU, 2009), h. 11

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹²

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik, maka terciptalah kesejahteraan, kemakmuran, serta keharmonisan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintahan Desa hendaklah berperan aktif untuk meningkatkan pembangunan dalam hal membangun masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, yang mana kemiskinan merupakan kondisi tidak tepenuhinya kebutuhan hak asasi atau esensial sebagai manusia. Pemerintahan Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah melakukan upaya menanggulangi angka kemiskinan. Menurut kepala urusan pemerintahan Muhammad Jamil.,SE, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa diantaranya meliputi:¹³

1. Adanya Bantuan Rumah atau Bedah Rumah Untuk Masyarakat Miskin.
2. Adanya Bantuan Beras Miskin (RASKIN) yang ditujukan atau dibagikan kepada masyarakat miskin.
3. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

¹²Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 26 Ayat 1

¹³Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan pada 07 Januari 2015

Sebagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Koto Tuo, namun kenyataannya angka kemiskinan juga semakin meningkat. Pada penelitian ini dibatasi pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1

**Jumlah Masyarakat Miskin Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar Pada Tahun 2010 s/d 2014**

No	Tahun	Jumlah Penduduk / Kepala Keluarga (KK)	Masyarakat Miskin / Kepala Keluarga (KK)
1	2010	793	123
2	2011	812	134
3	2012	834	147
4	2013	847	155
5	2014	861	164

Sumber Data : Kantor Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar

Jika dilihat dari tabel I.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah masyarakat miskin di Desa Koto Tuo tiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 adalah sebanyak 123 KK, tahun 2011 sebanyak 134 KK, tahun 2012 sebanyak 147 KK, tahun 2013 sebanyak 155 KK. Dan pada tahun 2014 jumlah kemiskinan naik menjadi 164 KK.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peranan Pemerintahan Desa Koto Tuo dalam mengurangi tingkat kemiskinan, maka penulis perlu mengadakan penelitian dengan sungguh-sungguh dengan judul :

“ Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar (Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti dari permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?
2. Apakah Faktor Penghambat atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperboleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.¹⁴

- a. Untuk mengetahui Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat atau Kendala Yang Dihadapi Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar saarjana hukum (S1 / Strata Satu) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi penulis penelitian dapat berguna untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh salama mengikuti perkuliahan.

¹⁴ *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2011), h.12

- c. Sebagai pendalaman pengetahuan yang telah dipelajari terutama dalam bidang upaya pemerintahan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
- d. Sebagai bahan informasi dari pihak yang berkepentingan terutama pada pihak Pemerintahan Desa Koto Tuo untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan mamfaat penelitian, maka penelitian telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang didapatkan langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, serta

mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena penulis mengamati peranan pemerintahan desa dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Selain itu penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat memahami lebih dalam peranan pemerintahan desa khususnya dalam hal yang bersifat membangun di Desa Koto Tuo.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala Desa Koto Tuo, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Dusun dan masyarakat miskin di Desa Koto Tuo.

Sedangkan objek penelitian ini adalah Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.¹⁵

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁶ Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala Desa Koto Tuo, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Dusun dan masyarakat miskin di Desa Koto Tuo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

h.118 ¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011),

¹⁶*Ibid*, h.119

Tabel I.2
Distribusi Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah
1.	Kepala Desa Koto Tuo	1 Orang
2.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Koto Tuo	1 Orang
3.	Sekretaris Desa Koto Tuo	1 Orang
4.	Kepala Urusan Pemerintahan	1 Orang
5.	Kepala Urusan Umum	1 Orang
6.	Kepala Urusan Keuangan	1 Orang
7.	Kepala Urusan Pembangunan	1 Orang
8.	Kepala Dusun	4 orang
9.	Masyarakat Miskin Desa Koto Tuo	15 Orang
	Total	26 Orang

Sampelnya adalah kepala Desa Koto Tuo, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Dusun dan masyarakat miskin di Desa Koto Tuo atau disebut juga dengan metode *Non propotional stratifield rondom sampling*,¹⁷ artinya cara pengambilan sampel dari anggota populasi tidak secara acak, namun sesuai dengan tingkatan dalam anggota populasi tersebut untuk

¹⁷Zainudi Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.9

memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian penulisan ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian.

b. Data Skunder

Data yang dikutip berbagai sumber sehingga data tersebut tidak otentik lagi karena sudah berasal dari tangan kedua dan seterusnya. Untuk itu data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak, website (internet), serta kamus hukum dan dokumentasi.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang objek penelitian ini.

c. Angket

Yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis .

d. Studi Pustaka

Yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

7. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul melalui studi perpustakaan tak terlepas juga wawancara dan angket yang akan diskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut dianalisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan teori, konsep maupun para ahli sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Yaitu Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti,, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif,

Yaitu dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian masalah ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Sejarah Singkat Desa Koto Tuo, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Koto Tuo, Keadaan Penduduk, Struktur Mata Pencarian, Letak Geografis Desa Koto Tuo. Sarana Ekonomi, Sarana Fisik Permukiman, dan Tipe Rumah Pemukiman Penduduk.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Peranan, Pemerintahan Desa, Serta istilah-istilah maupun penjelasan tentang Kemiskinan. Hal-hal tersebut diatas merupakan landasan yang nantinya mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan tentang Bagaimana Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan Apa sajakah faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Dalam Upaya

Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Koto Tuo
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dan bermamfaat bagi pihak Pemerintahan Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA